

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2007 - 2013 DI KABUPATEN BANGGAI

Yofandi Himran¹, Rosalina A.M Koleangan², George M.V. Kawung³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah dan bila semakin besar penerimaan PAD maka semakin kecil ketergantungan pada pemerintah pusat, sebab PAD merupakan sumber penerimaan dari dalam daerah sendiri yang di pungut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengetahui besar kecilnya tingkat kemandirian, ketergantungan dan desentralisasi selama kurun waktu 2007-2013, di kabupaten banggai dan dari hasil analisis dapat di lihat rata-rata kinerja keuangan daerah menggambarkan kinerja keuangan yang belum optimal dalam menjalankan atau melaksanakan otonomi daerah, hal itu dapat di lihat dari hasil PAD yang di capai masih sangat kecil dan dapat di tunjukan dengan indikator-indikator kinerja keuangan daerah: **Pertama** analisis rata-rata kemandirian keuangan daerah tahun 2007-2013 adalah 23,86% sehingga di klasifikasi menurut kriteria penilaian bahwa rasio kemandirian bersifat cukup artinya belum sepenuhnya mandiri masih ketergantungan bantuan dana pada pemerintah pusat, **kedua** bahwa rata-rata ketergantungan keuangan daerah tahun 2007-2013, adalah 30,73% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian bahwa rasio ketergantungan bersifat cukup artinya belum sepenuhnya mandiri masih ketergantungan dengan pemerintah pusat. **Ketiga** analisis rasa-rasa rasio desentralisasi keuangan daerah tahun 2007-2013 adalah 25,52% sehingga di klasifikasikan menurut kriteria penilaian bersifat sedang, hal ini mengandung makna bahwa kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah cenderung masih sangat rendah. **Keempat** berdasarkan hasil analisis bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 109,86% hal ini menunjukkan bahwa diatas 100% merupakan sangat efektif.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja Keuangan, Penerimaan Daerah, Efektifitas Keuangan

ABSTRACT

Local revenue and the balance funds are a source of local revenue, and when the greater acceptance of the local revenue, the smaller dependence on the central government, because Local revenue is a source of revenue from the region itself, which collected under the provisions of the applicable laws. This study aims to determine the size of the level of independence, dependence and decentralization during the period 2007-2013, in Banggai and analysis results can be viewed on average describe the financial performance of financial performance is not optimal in running or implementing regional autonomy, it can be seen from the results achieved Local revenue is still very small and can be shown by indicators of financial performance areas: First analysis of the average local financial independence in 2007-2013 was 23.86%, so in a classification according to the assessment criteria that independence ratio are not fully self sufficient means they dependency on central government funding, the second that the average area of the 2007-2013 financial dependence, is 30.73% that are classified according to the assessment criteria that the dependency ratio is sufficiently independent sepenuhnya means yet still dependence with government center. Third analysis flavors of local financial decentralization ratio in 2007-2013 was 25.52% thus classified according to the assessment criteria are being, this implies that the contribution of Local revenue in the region tends to sustain income is still very low. The fourth is based on the analysis that the effectiveness of financial management amounted to 109.86%, this shows that it is above 100% is very effective.

Keywords: Evaluation of Financial Performance, Local Revenue, Financial Effectiveness

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistim pemerintahan yang bersifat sentralistik pada masa orde baru yang membawa bangsa Indonesia pada pemerintahan yang mengedepankan sistem militer sejak tahun 1968 sampai 1998, pada masa itu ekonomi bangsa ini berkembang dengan pesat walupun di barengi dengan berbagai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), disamping itu kesenjangan ekonomi juga nampak di permukaan dan semakin meluas, pada masa itu pemerintahan militer lebih menunjukkan eksistensinya, sehingga nampak dimata masyarakat bahwa kekuasaan birokrasi militeristik lebih mengedepankan kekerasan. Seiring perputaran waktu, masa Orde baru itu pun diakhiri dengan, di latar belakang oleh sebuah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan rakyat, yang dapat dirasakan langsung pengaruhnya pada pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah di bawahnya, agar pelayanan negara pada masyarakat benar-benar terasa sampai pada lapisan masyarakat paling bawah. Dari kacamata ekonomi banyak hal yang dapat menguntungkan dari penerapan sistim desentralisasi ini, diantaranya adalah pemerintah daerah akan lebih muda menata dan mengelolah sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Apabila sumber daya alam yang dimiliki telah di kelola dengan baik maka pendapatan masyakat dan pendapatan daerah akan meningkat, Hal ini sama dengan tujuan dari desentralisasi yaitu mau menciptakan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bisa di pahami oleh pemerintah daerah, lewat program pelaksanaan pembangunan “ekonomi“ untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat yang merupakan tujuan dari terbantu Desentralisasi. Mengukur kinerja keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting, guna mengetahui dan menilai akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan dan mengelola keuangan daerah, bukan hanya sekedar menunjukkan kemampuan bagaimana membelanjakan uang publik, namun diperlihatkan pula sisi ekonomis, efisinsi dan atau efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur dalam penelitian kali ini dengan pengukuran kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, Desentralisi fiskal dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Banggai. Kemampuan keuangan daerah merupakan kekuatan dalam melaksanakan otonomi daerah, ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Halim (2001) dalam Dwiranda. Didalam Pengelolaan keuangan daerah telah di atur dalam Undang-undang nomor 32 tentang pemerintah daerah tahun 2004 dan Undang-undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut diatas telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan dana, menentukan arah, target dan tujuan dalam penggunaan dan pemanfaatan dana publik. Untuk menjalan sistem otonomi daerah banyak hal yang akan kita jumpai yang merupakan kendala, seperti kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan dan lemahnya struktur dan infrastruktur didalam daerah yang merupakan kenyataan yang tidak bisa di tawar, kesepakatan dalam sistim pemerintahan desentralisasi fiskal, adalah pengelolaan keuangan daerah atau anggaran daerah harus di kelola secara hati-hati. Hal tersebut guna menghindari ketidak efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pentingnya dalam menjalankan dan mengelola kebijakan otonomi daerah yaitu adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui optimalisasi peningkatan potensi penerimaan daerah yang mandiri dengan kemampuan Sumber Daya Alam yang ada di kabupaten Banggai/Kota Luwuk.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari : (1) Hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatn asli daerah yang sah, hal ini dapat diharapkan menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. selama kurun waktu 2007-2013 Kabupaten Banggai mempunyai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan dan hal itu terjadi pada tahun 2013, yang disebabkan adanya peningkatan jumlah yang di terima pada retribusi daerah yaitu

sebesar Rp.31.726.246.400, dengan bertambahnya jumlah yang diterima pada redistribusi daerah di tahun 2013, mengakibatkan PAD meningkat, namun pada tahun 2007 dan 2010 pemerintah kabupaten banggai mengalami penurunan penerimaan PAD, hal ini di sebabkan karena Perusahaan air minum (PDAM) mengalami kerugian sehingga pemerintah tidak lagi melakukan penyertaan modal pada perusahaan tersebut, karena di akibatkan dari tahun ke tahun perusahaan tersebut mengalami kerugian sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada daerah dalam penguatan PAD, hal inilah yang menyebabkan penerimaan PAD pada tahun 2010 menurun. Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kab Banggai. Dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas kepada daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah dalam melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam sistim otonomi daerah merupakan hal penting untuk menilai kinerja keuangan daerah bukan sekedar menilai kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kondisi keuangan pemerintah daerah termasuk komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai setiap tahun didominasi sumber rsumber dana yang berasal dari pemerintah pusat. Sementara pendapatan asli daerah masih relatif rendah tanpa ada pertumbuhan yang berarti dari sisi jumlah penerimaan, sehingga kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih terbatas. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan upaya upaya strategis untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada agar Kabupaten Banggai bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada ujungnya bisa memperbaiki kemampuan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian terhadap kinerja keuangan daerah dengan judul : **Analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2007-2013 dikabupaten Banggai.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diteliti adalah

1. Bagaimana kinerja Keuangan daerah dikabupaten Banggai selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2013.
2. Mengukur efektifitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2007-2013.

Tujuan Penelitian

1. Mengukur seberapa besar Rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal daerah dikabupaten Banggai.
2. Mengukur seberapa efektif pengelolaah keuangan daerah kabupaten Banggai.

Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio ketergantungan keuangan daerah
2. Bagi para pengambil keputusan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya perbaikan kebijakan kedepan.
3. Bagi pemerintah setempat dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Konsep Desentralisasi

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam NKRI sesuan UUD1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris

diwujudkan dalam pandangan bahwa Republik Indonesia mempunyai kesatuan pemerintah lain yang bersifat negara. Artinya sebuah kedalautan yang melekat kepada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak dapat terbagi dengan kesatuan pemerintahan. Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah (Suwandi, 2002). Kemandirian suatu daerah merupakan kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyakuti tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang tersebut meliputi (1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang di keluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; (2). Analisis pengeluaran, analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan public dan factor- factor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; dan (3). Analisis anggaran yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang di proyeksikan untuk masa depan. (Mardiasmo, 2000).

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian di tunjukan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya Alam, Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alakosi Khusus (DAK) dana darurat dan dana pinjaman (Widodo, 2001 :262).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipati masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan

transfer dengan total realisasi pendapatan daerah. Dalam hal ini, akan dilihat bagaimana ketergantungan antara pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat.

Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Syamsi (1986) kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Banggai tahun 2007-2013, sedangkan data kualitatif berupa gambaran umum objek penelitian Kabuapten Banggai yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi tengah. Data adalah keterangan yang diperlukan dalam penelitian atau dengan kata lain sebagai bahan informasi mengenai variable-variabel yang akan di teliti. Untuk memeproleh data atau keterangan yang ada hubungan dengan penelitian ini. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berdasarkan data time series periode 2007 – 2013, penulis gunakan data dalam kurun waktu tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Banggai, tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengamatan (Observasi)
Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) dan Biro Keuangan sekretaris daerah Kabupaten banggai sebagai objek Penelitian.
- b. Wawancara
Mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi
Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada, data dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai tahun 2007-2013.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Metode Analisis kinerja keuangan daerah yang diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur dalam setiap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabuapten /Kota/Propinsi menurut Halim (2001:127).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah :

Rasio Kemandirian	=	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
Keuangan Daerah		Dana Perimbangan	

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Penilaian Kemandirian keuangan daerah

Presentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0.00 - 10.00	Sangat Baik
10.01 - 20.00	Baik
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Kurang
> 50.00	Sangat Kurang
Sumber : Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991	

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (dana Perimbangan). Dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi}}$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat di lihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase PAD terhadap Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan
0.00 - 10.00	Sangat Rendah
10.01 - 20.00	Rendah
20.01 - 30.00	Sedang
30.01 - 40.00	Cukup
40.01 - 50.00	Tinggi
> 50.00	Sangat Tinggi
Sumber : Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991	

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut ini formula untuk mengukur tingkat desentralisasi fiskal.

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Adapun Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat kategorikan seperti table 3 di bawah ini:

Tabel 3 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991

Rasio Efektifitas

Pengukuran tingkat efektifitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efektifitas Pengelolaan keuangan daerah dapat di lihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4 Kriteria penilaian Efektifitas pengelolaan Keuangan daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Berdasarkan pemahaman atas kondisi perekonomian daerah maka diformulasikan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah seyogianya senantiasa diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan-kegiatan utama dan strategis berdasarkan potensi local dalam rangka membangun kesejahteraan yang proporsional antar wilayah serta dengan memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio Tingkat Kemandirian keuangan Daerah

Dalam mengimplementasikan peran pemerintah sebagai penyedia barang publik, pemerintah daerah memiliki instrumen yang dapat memberikan stimulus dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan APBD untuk menjadi alat stimulus tersebut sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi jenis-jenis penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bagian dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 5 : Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Tahun 2007 – 2013

Tahun	Pad	Dana perimbangan	Rasio (%)	Keterangan
2007	16,304,160,264	475,371,748,510	38.79	Cukup
2008	23,043,409,324	529,177,916,940	29.85	Cukup
2009	24,295,252,062	534,518,223,970	23.64	Cukup
2010	18,611,840,850	206,593,880,641	9.94	Baik
2011	28,806,721,000	568,640,817,000	27.23	Cukup
2012	35,010,250,000	641,755,539,000	21.35	Cukup
2013	47,975,000,000	779,419,501,000	16.25	Baik
Rata-rata	172,293,111,255	3,735,477,627,061	23,86	Cukup

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada tabel 5 diatas, dapat di lihat bahwa, dari tahun 2007-2013 menunjukkan presentase tingkat ketergantungan yang terus menerus mengalami penurunan secara rasio walaupun terjadi peningkatan kinerja PAD setiap tahunnya namun masih juga tetap di ikuti dengan peningkatan perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menggantungkan harapan pada pemerintah pusat, ada beberapa daerah yang sudah mampu membiayai dirinya sendiri dengan kemampuan sumber daya alam yang tersedia, dan yang tidak kalah pentingnya kesiapan dan dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan. Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah pada tabel 4.1 diatas rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banggai tahun 2007-2013 adalah **23.86 %** sehingga Apabila di klasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat kemandirian keuangan daerah maka kabupaten Banggai dengan tingkat kemandirian keuangan daerah **Cukup**. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten banggai selama tahun 2007-2013 memiliki kemandirian keuangan yang sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat lewat dana perimbangan. Berdasarkan pemahaman atas kondisi perekonomian daerah maka diformulasikan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah seyogianya senantiasa diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan-kegiatan utama dan strategis berdasarkan potensi local dalam rangka membangun kesejahteraan yang proporsional antar wilayah serta dengan memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah.

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah malalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tanpa subsidi (dana perimbangan) :

Tabel 6 : Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Tahun 2007 – 2013

Tahun	Realisasi PAD	Penerimaan non subsidi	Rasio	Keterangan
2007	16,304,160,264	525,923,510,800	32.26	Cukup
2008	23,043,409,324	546,371,947,874	23.71	Sedang
2009	24,295,252,064	521,753,065,463	21.48	Sedang
2010	18,611,840,850	440,051,667,773	23.64	sedang
2011	35,337,773,443	785,695,130,004	22.23	sedang
2012	40,255,000,000	955,176,963,650	23.73	Sedang
2013	54,255,000,000	1,017,116,849,962	18.78	Rendah
Rata-rata	212,006,681,345	4,792,089,135,526	30.73	Cukup

Tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio antara PAD dan APBD non subsidi pada tabel 4.2 (Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah) menunjukkan tingkat presentase yang berfluktuatif, seperti yang kita amati pada tabel di atas bahwa pada tahun 2007 tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat adalah sebesar 32,26% turun pada tahun anggaran 2008 menjadi 23,71% kemudian turun lagi pada tahun anggaran 2009 21,48% lalu kemudian naik lagi pada tahun 2010 mencapai 23,64% pada tahun 2011 kembali turun menjadi 22,23% dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 23,73% dan pada periode tahun anggaran 2013 kembali turun menjadi 18,78% tingginya presentase menunjukkan peningkatan ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten banggai terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu tahun 2007-2013 adalah 30,73% hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya menuju pada optimalisasi dalam hal membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah melalui dana perimbangan. Apabila di klasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat ketergantungan keuangan daerah **Cukup**.

Rasio Desentralisasi Fiskal.

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio tingkat desentralisasi fiskal selama kurun waktu 2007-2013 dalam kajian ini di gunakan alat ukur rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Tabel 7 : Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Tahun 2007 – 2013

Tahun	Realisasi PAD	Total Penerimaan	Rasio	Keterangan
2007	16,304,160,264	523,821,142,944	32.13	Cukup
2008	23,043,409,324	605,139,121,910	26.26	Sedang
2009	24,295,252,064	630,106,818,255	25.94	Sedang
2010	18,611,840,850	219,622,110,445	36.39	Cukup
2011	35,337,773,443	674,874,556,000	19.10	Sedang
2012	40,255,000,000	831,834,663,287	20.66	Sedang
2013	54,159,245,400	987,015,912,424	18.22	Kurang

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat di ketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Banggai cukup tinggi dari tahun ke tahun, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan sebuah daerah dalam menjalankan pambangunan atau kemampuan PAD dalam menopang kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah, terlihat sangat jelas bahwa kemampuan PAD sangat kecil dalam presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total penerimaan Daerah (TPD), Berdasarkan hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2007-2013 adalah **25,52 %** sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi Fiskal adalah untuk Kabupaten Banggai **Sedang** (Lihat **Tabel 3.3** Kriteria Penilaian tingkat Desentralisasi Fiskal). Masih besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama di tunjukan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan sendiri masih kurang dari 50 % artinya sangat kurang kemampuan PAD dan cenderung masih menggantungkan pembiayaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kecenderungan ini disebabkan masih rendahnya kinerja pemungutan pajak daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam bingkai desentralisasi fiskal.

Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 8 : Rasio Tingkat Efektifitas Tahun 2007 – 2013

Tahun	Realisasi PAD	Target Pendapatan	Rasio

2007	16,304,160,264	12,255,225,000	133,0
2008	23,043,409,324	17,725,371,790	130,0
2009	24,295,252,064	22,610,993,465	107,4
2010	18,611,840,850	20,780,900,000	1,12
2011	35,337,773,443	28,806,721,000	122,7
2012	40,255,000,000	30,064,000,000	133,9
2013	54,159,245,400	47,975,000,000	112,9

Setelah kita mengamati tabel 8 diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan keuangan selama kurun waktu 2007-2013 adalah 109,86 menurut Kriteria Penilaian efektifitas Pengelolaan keuangan daerah, (Lihat Tabel 3.4) adalah (*Sangat efektif*) dengan tingkat efektifitas diatas 100%, sehingga efektifitas pengelolaan keuangan daerah ini perlu mendapat apresiasi dan tetap dipertahankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan terhadap Analisis Kinerja keuangan daerah tahun 2007-2013, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis terhadap rata-rata kinerja keuangan daerah, Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2007-2013, menggambarkan kinerja keuangan yang belum optimal dalam menjalankan atau melaksanakan otonomi daerah, hal ini di tunjukan oleh indikator kinerja keuangan daerah yang antara lain sebagi berikut :
 - a. Berdasarkan hasil analisis rata-rata **Kemandirian keuangan daerah** tahun 2007-2013 adalah **34.73%** sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian bahwa rasio kemandirian bersifat **Sedang**, artinya belum sepenuhnya mandiri masih mengharapkan bantuan dana dari Pemerintah pusat.
 - b. Berdasarkan hasil analisis rata-rata **Ketergantungan keuangan daerah** terhadap pemerintah pusat tahun 2007-2013 adalah **30.73 %** sehingga di klasifikasikan menurut kriteria penilaian bahwa rasio ketergantungan bersifat **Cukup** artinya belum sepenuhnya mandiri masih mengharapkan bantuan dana dari pemerintah pusat
 - c. Berdasarkan hasil analisis rata-rata Tingkat **Desentralisasi Fiskal** menurut kriteria penilaian tahun 2007-2013 adalah **25.52 %** sehingga di klasifikasikan menurut kriteria penilaian bahwa rasio Desentralisasi bersifat **Sedang** artinya bahwa mengandung makna kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah cenderung masih sangat rendah.h.
 - d. Berdasarkan hasil analisis rata-rata Penilaian dalam **efektifitas Pengelolaan keuangan daerah** tahun 2007 – 2013 adalah sebesar **109,86%** Sehingga di klasifikasikan menurut kriteria penilaian (*Sangat efektif*) dengan tingkat efektifitas diatas 100%, Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Banggai sudah tepat dan realistis dalam merencanakan pendapatannya terlihat dari rata-rata capaiannya yang berkriteria *sangat efektif*.

Saran

Penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber dari PAD, perlu ada peningkatan lagi, dengan cara mencari sumber-sumber pajak yang baru.
2. Perlu pembinaan terhadap wajib pajak yang di motori oleh dinas terkait supaya lebih baik, terarah dan maksimal dalam pemungutan pajak.
3. Perlu adanya transparansi bagi wajib pajak, agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tarif pajak bagi masyarakat wajib pajak.
4. Pemerintah lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang belum terakomodir /tercatat untuk segera di buatkan perda dalam hal pemungutan pajaknya.

5. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pajak dan Restribusi daerah adalah pengembangan kawasan strategis dan memperhatikan keseimbangan daya dukung alam antara potensi sumber daya alam dengan rencana pengembangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Drs. M. Suparmoko, M.A.,PhD.** Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5.
- Halim, Abdul.** 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi ketiga UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo., 2001** Perencanaan Keuangan Publik sebagai suatu tuntunan dalam pelaksanaan pemerintah daerah.
- Mardiasmo. 2002.** Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta
- Haryanto Djalumang, SE,** Sejarah Kabupaten Banggai, Yayasan LP3M Insan Cita. Bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banggai (2012)
- Sumarni,Rini 2012.** Analisis peranan pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan Daerah kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1990-2009. Diss UAJY.
- Prof.Dr. Sugiyono,** Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Alfabeta 2014
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Bisma, I., Dewa Gde, and Hery Susanto.** Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.” Jurnal Gene Swara Edisi Khusus Vol 4 (2010).
- Herry Goenawan Soedarsa dan Ayrina Tryasmarini D. Putri** “Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kota Se-Propinsi Lampung. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5, NO. 2, 2014.
- Murphy, Kevin J., and Jerold L. Zimmerman.** "Financial performance surrounding CEO turnover." *Journal of Accounting and Economics* 16.1 (1993): 273-315.
- William L, Robert C, Matthias 1998,** The Fenancial and Operating Performance of Newly Privatized Firms an international Empirical Analysis.
- Wang, Yu-Jie.** "Applying FMCDM to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan." *Expert Systems with Applications* 34.3 (2008): 1837-1845.
- Alkhatib, Akram, and Murad Harasheh.** "Financial performance of Palestinian commercial banks." *International Journal of business and social science* 3.3 (2012)
- Sumarsono, Hadi.** “Analisis Kemandirian Otonomo Daerah : Khusus Kota Malam (1999-2004)” Jurnal Ekonomi Pembangunan 1.1 (2009).
- Dwirandra, A. A. N. B.** "Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/kota di Propinsi Bali tahun 2002–2006." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 3.2 (2008).
- Adi, Priyo Hari. 2005.** Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah,Belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang.*
- Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec.,** Manajemen Keuangan Daerah, PPKED UNHAS 2009.
- Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec.,** Pembiayaan Pembangunan Daerah, PPKED UNHAS 2009.
- Wenny, Cherrya Dhia.** "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan." *Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP.* Vol. 2. No. 1. STIE MDP, 2012.
- Oesi Agustina. A . 2013.** *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal. Ekonomi dan Bisnis.Malang*
- Hadi Sasana.** Analisis dampak pertumbuhan ekonomi kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di propinsi Jawa dalam era Desentralisasi Fiskal.Jurnal Bisnis dan Ekonomi.Maret 2009,Vol. 16, No.1 ISSN: 1412-3126

- Mardiana dan Syafril Basri.** 2012. Desentralisasi fiskal dan disparitas Regional di propinsi Riau. Jurnal Ekonomi.
- Susiyati Bambang Hirawan.** Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar. Jakarta. 2007.
- Adi Priyono Hari,** Hubungan antar Pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah “ Dalam Simposium Nasional Akuntansi IX Padang (2006).
- Sasana, Hadi.** “Dampak Pelaksanaan Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar wilayah, antar sector di kabupaten/kota Propinsi Istimewa Yogyakarta” (2005).
- Sinaga, Bonar M. and Herman Siregar** “Dampak kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi daerah dindonesia 2005.
- Indah Siska Permata** “ Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap PDRB. Tenaga Kerja, dan kemiskinan Propinsi Jawa Barat”. (2011)
- Sasana, Hadi Analisis.** dampak Desentralisasi Fiskal dan pertumbuhan Ekonomi terhadap kesenjangan di kabupaten/Kota propinsi Jawa Tengah “AKSES 4,7 (2009).
- Dartanto, Teguh, and Bambang PS Brodjonegoro.** Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah : Analisis model makro Ekonomi Sumultan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 4.1 (2003):17-38.
- Supriyadi, Armandelis dan selamet Rahmadi** “Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo “ Jurnal Perspektif Pembiayaan dan pembangunan daerah Vol 1 No. 1 Juli 2013 ISSN 2338-4603.
- Wardatul Fadhilah, Dian Sari.** “Analisis potensi Penerimaan, Efektivitas dan Tax Effort pajak penerangan Jalan serta pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).